



## **COVID-19 dan Kerentanan bagi Pekerjaan Memikirkan Kembali Hak dan Tanggungjawab bagi Tempat Kerja yang Lebih Aman**

Dr Hidayat Greenfield  
Sekretaris Regional IUF Asia/Pasifik

20 April 2020

Di seluruh wilayah Asia/Pasifik para pengusaha di semua industri dan sektor telah menerapkan beberapa bentuk tindakan COVID-19 di tempat kerja. Dalam beberapa kasus, langkah-langkah komprehensif diperkenalkan melalui negosiasi dengan serikat pekerja, memastikan bahwa hak-hak pekerja untuk terwakili dan hak-hak perundingan bersama dihormati. Hak untuk menegosiasikan perubahan adalah hak mendasar dan tidak boleh ditangguhkan dalam keadaan darurat. Melalui kesepakatan bersama tentang perubahan dalam pengaturan kerja dan kondisi kerja untuk mengurangi risiko COVID-19, para pengusaha dan serikat pekerja memastikan tempat kerja yang lebih aman dan komunitas yang lebih aman. Serikat pekerja memainkan peran penting dalam menjelaskan langkah-langkah keselamatan COVID-19 yang disepakati bersama kepada para pekerja dan komunitas mereka, memastikan implementasi yang lebih efektif. Setiap kekurangan dalam implementasi - termasuk kasus di mana beberapa pekerja dikecualikan atau ditempatkan pada risiko yang lebih besar - dikomunikasikan dan diselesaikan. Ini membantu memastikan bahwa langkah-langkah keamanan COVID-19 tidak diskriminatif atau tidak adil. Serikat pekerja memberikan umpan balik tentang masalah, masalah yang baru, serta solusi-solusi dan pengusaha bertindak untuk mengatasi hal ini, menyelesaikannya bersama dengan serikat pekerja. Ini benar-benar satu-satunya contoh di mana pengusaha dapat mengklaim bahwa kita "bekerja bersama" untuk mengatasi pandemi COVID-19.

Kenyataannya adalah bahwa dalam kebanyakan kasus, kebijakan-kebijakan COVID-19 dilaksanakan secara sepihak oleh para pengusaha. Tidak ada negosiasi, tidak ada umpan balik, tidak ada saling pengertian tentang apa yang perlu untuk dilakukan atau apa yang perlu diperbaiki. COVID-19 memperkenalkan langkah-langkah pemeriksaan suhu, jarak fisik, dan mengubah jadwal kerja, tetapi tidak melakukan apa pun untuk melibatkan pekerja dalam menjalankannya. Dan jika sesuatu tidak berjalan, tidak ada yang akan tahu hingga semuanya sudah terlambat.

Dalam beberapa kasus, langkah-langkah keselamatan diperkenalkan untuk memenuhi persyaratan pemerintah daerah agar tetap beroperasi sebagai suatu pelayanan yang penting. Karena persyaratan pemerintah sering berubah (di beberapa negara peraturan lokal dan nasional saling bertentangan), para pekerja bingung dengan pengaturan-pengaturan baru dan dihukum secara tidak adil. Karena tidak dapat melapor untuk tugas, para pekerja menderita kehilangan bayaran atau pemutusan hubungan kerja. Di beberapa negara, para pekerja diancam dan diintimidasi di pos pemeriksaan di mana polisi atau tentara lebih ditentukan untuk menekan

manusia daripada virus corona. Meskipun demikian, banyak pengusaha bahkan menolak mendiskusikan dengan serikat pekerja terkait tantangan yang dihadapi oleh pekerja yang berangkat dan pulang bekerja.

Dalam kasus-kasus lain, tampaknya tindakan COVID-19 dirancang untuk mempromosikan reputasi perusahaan, meningkatkan merek, atau menghindari kerusakan reputasi. Pengumuman publik tentang bekerja bersama untuk mengatasi COVID-19 tampaknya lebih penting daripada apa yang sebenarnya terjadi di tempat kerja. Ini terbukti dalam perusahaan global yang memberikan sumbangan publik dalam jumlah besar untuk memerangi COVID-19 sementara gagal menyediakan masker yang memadai atau Alat Pelindung Diri (APD) lainnya bagi para pekerja. Ada juga contoh perusahaan-perusahaan transnasional besar yang memberikan sumbangan publik sambil menolak upah kepada pekerja yang diduga terinfeksi COVID-19, di bawah karantina sendiri. Dalam pertarungan bersama melawan COVID-19 ini, pekerja yang melakukan hal yang benar dengan mengisolasi diri selama 14 hari tidak dibayar: tidak bekerja, tidak dibayar. Membotolkan minuman ringan bersoda adalah pekerjaan; tinggal di rumah sakit untuk mengurangi risiko menularkan kepada orang lain hanyalah hari libur.

Secara jelas pendekatan sepihak oleh pengusaha terhadap COVID-19 telah menyebabkan kelemahan serius dalam penerapan tindakan keselamatan di tempat kerja, seringkali menyebabkan kebingungan dan kesulitan yang hanya meningkatkan risiko. Ada juga banyak kebingungan mengenai hak dan tanggung jawab. Bagian dari masalah adalah bahwa para pengusaha menanggapi COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang secara tidak langsung mempengaruhi tempat kerja. Mereka melihatnya sebagai tugas publik untuk menangani COVID-19 dan untuk memastikan bahwa penularan penyakit oleh masyarakat berhenti di depan pintu sampai menuju tempat kerja. Tetapi COVID-19 sudah merupakan penyakit akibat kerja, dan ini mengubah tanggung jawab pengusaha dan memaksa kita untuk memikirkan kembali keselamatan pekerja.

Menurut standar-standar ILO dan COVID-19 yang dipublikasikan pada 27 Maret 2020:

" COVID-19 dan gangguan stres paska trauma, jika dikontrak melalui paparan kerja, dapat dianggap sebagai penyakit akibat kerja."<sup>1</sup>

Sementara COVID-19 tidak disebutkan namanya dalam Daftar Rekomendasi Penyakit Kerja ILO, 2002 (No. 194) itu dicakup dalam Pasal 1.3.9 .:

"1.3.9. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh agen-agen biologis lain di tempat kerja tidak disebutkan dalam hal sebelumnya di mana hubungan langsung ditentukan secara ilmiah, atau ditentukan oleh metode yang sesuai dengan kondisi dan praktik nasional,

---

<sup>1</sup> ILO International Labour Standards Department, *ILO Standards and COVID-19 (coronavirus)*, Geneva: ILO, March 27, 2020, p.14. [https://www.ilo.org/global/standards/WCMS\\_739937/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_739937/lang--en/index.htm)

antara paparan agen-agen biologis ini yang timbul dari aktivitas kerja dan penyakit (penyakit) yang dikontrak oleh pekerja."<sup>2</sup>

Asosiasi Jaminan Sosial Internasional (ISSA), yang didirikan pada tahun 1927 di bawah naungan Organisasi Buruh Internasional (ILO), mengamati bahwa:

" Secara praktis, perlu ada hubungan langsung antara paparan terhadap virus korona itu sendiri (SARS-CoV-2) di tempat kerja dan penyakitnya (COVID-19) untuk dapat mengklasifikasikannya sebagai penyakit pekerjaan. Kondisi pertama - bukti ilmiah bahwa SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19 - adalah fakta ilmiah yang telah terbukti, tetapi dalam banyak kasus, akan sulit untuk menciptakan hubungan sebab akibat, untuk membuktikan bahwa penyakit itu tertular di tempat kerja. Jika terbukti bahwa virus itu dikontrak melalui paparan pekerjaan, setiap pekerja dilindungi dalam daftar ILO."<sup>3</sup>

Bukti paling nyata dari paparan kerja adalah bahwa seorang pekerja terinfeksi COVID-19 saat berada di tempat kerja. Tetapi tempat kerja tidak hanya berarti pabrik, hotel, peternakan atau kantor. Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja ILO, 1981 (No. 155) mendefinisikan tempat kerja sebagai berikut:

"(c) istilah tempat kerja mencakup semua tempat di mana pekerja harus atau pergi dengan alasan pekerjaan mereka dan yang berada di bawah kendali langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja;"<sup>4</sup>

*Semua tempat di mana pekerja harus atau pergi karena pekerjaan mereka.* Ini berarti perjalanan menuju dan dari tempat kerja termasuk ke dalam tempat kerja, dan paparan terhadap risiko COVID-19 menuju dan dari tempat kerja dianggap sebagai paparan pekerjaan.

Dengan mengacu pada Konvensi No. 155, standar-standar ILO dan COVID-19 juga menegaskan kembali hak para pekerja untuk menolak bekerja jika mereka percaya bahwa tempat kerja (termasuk semua tempat di mana pekerja harus berada atau pergi dengan alasan pekerjaan mereka) tidak aman:

"Pekerja memiliki hak untuk mengeluarkan diri dari situasi kerja yang menurut mereka memiliki pertimbangan yang masuk akal untuk menyampaikan keyakinan dan bahaya serius bagi bahaya serius bagi kehidupan atau kesehatan mereka. Ketika seorang anggota

---

<sup>2</sup> ILO *List of Occupational Diseases Recommendation, 2002 (No. 194)*

[https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100\\_INSTRUMENT\\_ID:312532](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312532)

<sup>3</sup> International Social Security Association (ISSA), "Can COVID-19 be considered an occupational disease?", April 2, 2020. <https://www1.issa.int/news/can-covid-19-be-considered-occupational-disease>

<sup>4</sup> ILO, *Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155)*

[https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100::NO:12100:P12100\\_INSTRUMENT\\_ID:312300](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312300)

staf menjalankan hak ini, ia harus dilindungi dari segala konsekuensi yang tidak semestinya."<sup>5</sup>

Salah satu tantangan mendasar dalam memahami hak-hak dan tanggung jawab untuk tempat kerja yang aman dalam pandemi COVID-19 adalah kecenderungan para pengusaha untuk terlalu fokus pada perilaku pekerja sebagai sumber masalah dan solusinya. Selama dua dekade terakhir banyak pengusaha telah mengadopsi pendekatan Keselamatan Berbasis Perilaku (BBS) untuk kesehatan dan keselamatan kerja. Alih-alih menjamin hak-hak pekerja terhadap tempat kerja yang aman, pekerja dianggap bertanggung jawab atas keselamatan mereka sendiri dan keselamatan orang lain. BBS didasarkan pada asumsi bahwa perilaku pekerja dan tindakan tidak aman oleh individu pekerja adalah penyebab utama cedera, penyakit, dan kematian. Menurut pendekatan BBS, jika perilaku pekerja dapat diubah, dan pekerja bekerja lebih hati-hati, cedera akibat pekerjaan, penyakit dan kematian akan dicegah, dan tempat kerja akan lebih aman.<sup>6</sup>

Pendekatan ini mengabaikan tanggung jawab para pengusaha untuk memastikan tempat kerja yang aman. Mengurangi paparan terhadap zat-zat beracun atau agen-agen biologis, misalnya, bukanlah hanya masalah individu pekerja yang menggunakan APD. Para pengusaha harus terlebih dahulu mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko di tempat kerja dengan mengatur ulang pekerjaan dan menghilangkan atau mengurangi zat-zat beracun atau bahaya lainnya. Jika risiko pekerjaan yang tak terhindarkan tetap ada, maka pengusaha harus memberikan APD gratis yang memadai serta pelatihan penggunaan APD. Pengaturan kerja dan waktu kerja (termasuk mengenakan dan melepas APD) harus ditata ulang untuk memaksimalkan keselamatan.

Tanggapan sepihak pengusaha terhadap COVID-19 sebagian besar didasarkan pada pendekatan BBS ini. Ini semua tentang tanggung jawab individu untuk kesehatan dan kebersihan pribadi serta mengikuti aturan. Tidak diragukan lagi, kesehatan dan kebersihan pribadi itu penting (cuci tangan Anda!). Begitu juga menggunakan pelindung wajah dan menjaga jarak fisik 1,5 atau 2 meter. Tetapi para pengusaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa upaya individu pekerja dapat dilaksanakan dan efektif. Para pekerja harus diberi fasilitas mencuci tangan, APD, ruang fisik, dan waktu yang diperlukan untuk melakukan semua ini. Penyesuaian waktu kerja, termasuk waktu istirahat dan kecepatan serta tekanan pekerjaan, sangat penting untuk tempat kerja yang aman. Pengusaha juga harus memastikan transportasi yang aman menuju dan dari tempat kerja untuk mengurangi risiko menjadi terinfeksi, dan untuk mengurangi risiko bagi keluarga pekerja. Ini semua tergantung pada akses setiap pekerja terhadap *hak kolektif* untuk tempat kerja yang aman. Hanya melalui akses terhadap hak-hak ini para pekerja dapat berkontribusi untuk keselamatan.

---

<sup>5</sup> ILO International Labour Standards Department, *ILO Standards and COVID-19 (coronavirus)*, Geneva: ILO, March 27, 2020, p.13. [https://www.ilo.org/global/standards/WCMS\\_739937/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_739937/lang--en/index.htm)

<sup>6</sup> IUF Food Processing Division, *Behaviour-Based Safety Programs*, Geneva: IUF, January 2019.

Akses terhadap hak dan perwakilan kolektif melalui serikat pekerja sangat penting untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Sangat penting untuk memastikan aksi dan kerja sama kolektif. Sangat penting untuk memastikan bahwa *kita* melakukan ini. Penting juga untuk mengatasi krisis dan resesi setelah COVID-19. Dengan mengabaikan serikat pekerja dan menolak untuk menegosiasikan perubahan yang diperlukan untuk memastikan tempat kerja yang aman dalam pandemi bencana ini, pengusaha meningkatkan risiko dan menciptakan keraguan, meninggalkan jutaan pekerja dengan pertanyaan yang jelas: jika kita bekerja sama untuk mengatasi COVID-19 .. siapakah sebenarnya "kita"?